



DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG



**TINJAUAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN 2019**



DINAS STATISTIK
LAMBANG KOTA SINGARAJA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK



Ir. I KETUT NERDA
KEPALA DINAS STATISTIK
KABUPATEN BULELENG



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

KATA PENGANTAR

Publikasi **“Tinjauan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buleleng 2019”** dapat diterbitkan atas kerjasama Dinas Statistik Kabupaten Buleleng dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng. Publikasi ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran sampai sejauhmana perkembangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng telah dicapai selama pembangunan tahun 2018. Indikator-indikator yang terangkum diharapkan berfungsi sebagai input dalam perencanaan daerah serta sebagai acuan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Buleleng yaitu : Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berdalandaskan Tri Hita Karana.

Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Informasi dasar yang disajikan meliputi tujuh bidang yaitu kependudukan, fertilitas dan KB, perumahan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta pola konsumsi dan distribusi pendapatan. Mengingat luasnya cakupan pengertian kesejahteraan dan

terbatasnya data yang tersedia, maka publikasi ini disusun dalam bentuk makro berdasarkan hasil dari survei di atas.

Bagaikan pepatah, *'tak ada gading yang tak retak'* demikian pula adanya dengan publikasi ini. Namun demikian, upaya-upaya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya tentu selalu dilakukan. Oleh karenanya, saran dan kritik yang konstruktif sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih.

Semoga publikasi ini bermanfaat sebagaimana yang diharapkan

Singaraja, Nopember 2019

Kepala Dinas Statistik
Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Ir. I Ketut Nerda

NIP. 19690606 198901 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Katalog	ii
Lambang Kabupaten Buleleng	iii
Foto	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar tabel	xi
Daftar gambar	xii
Daftar Lampiran	xi
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Gambaran Umum	3
B. Sistematika Penulisan	5
BAB II Metodologi	7
A. Ruang Lingkup Survei	9
B. Kerangka Sampel	9
C. Rancangan Sampel	10
D. Metode Pengumpulan Data	11
E. Pengolahan Data	11
F. Konsep dan Definisi	12

BAB III	Pembahasan.....	35
	A. Kependudukan	37
	B. Kesehatan	44
	C. Pendidikan.....	54
	D. Pola Konsumsi	62
	E. Perumahan	67
	F. Kemiskinan	84
	G. Sosial Lainnya.....	93
BAB IV	Penutup	101



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Indikator Kependudukan Kabupaten Buleleng, 2018.....	40
Tabel 3.2	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Buleleng, 2018	41
Tabel 3.3	Persentase Penduduk 10 tahun Keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Buleleng, 2018	42
Tabel 3.4	Persentase Penduduk 10 tahun Keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Kabupaten Buleleng,2018	48
Tabel 3.5	Persentase Perempuan yang Pernah kawin Menurut tempat melahirkan, Kabupaten Buleleng, 2018	49
Tabel 3.6	Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Kawin menurut Penolong Proses Kelahiran Kabupaten Buleleng,2018	50

Tabel 3.7	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut lamanya Rawat Inap, Kabupaten Buleleng, 2018	51
Tabel 3.8	Persentase Penduduk Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan, Kabupaten Buleleng, 2018	52
Tabel 3.9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal Penduduk Berumur 7-18 Tahun Menurut Karakteristik dan kelompok Umur, 2018.....	57
Tabel 3.10	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Buleleng 2018	59
Tabel 3.11	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Buleleng, 2018	61
Tabel 3.12	Prosentase Penduduk 15 tahun Keatas Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin, kabupaten Buleleng, 2018	62

Tabel 3.13	Indikator Konsumsi Kabupaten Buleleng, 2018	67
Tabel 3.14	Persentase Rumah Tangga Menurut Atap Rumah Kabupaten Buleleng, 2018	73
Tabel 3.15	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal, Kabupaten Buleleng, 2018	74
Tabel 3.16	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita, Kabupaten Buleleng, 2018	75
Tabel 3.17	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Utama Dinding, Kabupaten Buleleng, 2018	76
Tabel 3.18	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bangunan Utama Lantai, Kabupaten Buleleng, 2018 ..	77
Tabel 3.19	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar, Kabupaten Buleleng, 2018	78

Tabel 3.20	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Buang Air Besar, Kabupaten Buleleng, 2018	79
Tabel 3.21	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, Kabupaten Buleleng, 2018	80
Tabel 3.22	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum, Kabupaten Buleleng, 2018	81
Tabel 3.23	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Memasak dan MCK, Kabupaten Buleleng, 2018	82
Tabel 3.24	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Memasak, Kabupaten Buleleng, 2018	83
Tabel 3.25	Indikator Sosial Lainnya, Kabupaten Buleleng, 2018	94

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1	Piramida Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2018.....	43
GAMBAR 3.2	Angka Harapan Hidup, Kabupaten Buleleng 2013 – 2018	53
GAMBAR 3.3	Penduduk Kab. Buleleng Menurut Terganggunya Kegiatan Akibat Keluhan Kesehatan, Kabupaten Buleleng 2018	53
GAMBAR 3.4	Perbandingan Konsumsi Makanan dan Non Makanan Kabupaten Buleleng 2018	65
GAMBAR 3.5	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng Tahun 2016 - 2018	86
GAMBAR 3.6	Garis Kemiskinan di Kabupaten Buleleng Tahun 2016 – 2018	87
GAMBAR 3.7	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Buleleng Tahun 2016 - 2018	89
GAMBAR 3.8	Persentase Penduduk Rumah Tangga Menerima Kredit Usaha Di Kabupaten Buleleng Tahun 2018	95

GAMBAR 3.9 Persentase Penduduk Buleleng Yang Berumur 5 tahun Keatas Yang Menguasai/memiliki telepon Seluler (HP) Dalam 3 Bulan Terakhir tahun 2018 97

GAMBAR 3.10 Persentase Penduduk Buleleng Yang Berumur 5 tahun Keatas Yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Tahun 2018 98



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK



BAB I

PENDAHULUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Membangun suatu daerah, tentunya bukan hanya semata-mata tentang penambahan infrastruktur saja. Lebih dari itu, membangun suatu daerah perlu dilakukan secara holistik di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Membangun suatu daerah adalah tentang memberdayakan daerah tersebut, baik secara fisik infrastrukturnya maupun nonfisik seperti kualitas hidup, kesejahteraan, serta kualitas diri masyarakatnya. Satu tantangan terbesar dalam membangun suatu daerah adalah bagaimana mencapai pemerataan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Membangun suatu daerah merupakan upaya yang harus dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Untuk dapat mempertahankan keberlanjutan upaya pembangunan suatu daerah, maka para pelaku pembangunan hendaknya berpegang teguh pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, segala langkah yang diambil oleh pengambil kebijakan akan lebih terarah dan

tepat sasaran. Kebijakan disusun sedemikian rupa agar sumber daya yang dimiliki daerah dapat dikelola secara maksimal, efisien, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Proses pembangunan daerah kiranya sangat perlu dikawal mulai dari awal perencanaan hingga evaluasi hasil akhir. Untuk itu, dalam setiap tahap prosesnya sangat diperlukan informasi yang akurat yang menggambarkan sejauh mana upaya pembangunan tersebut dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Informasi tersebut juga digunakan sebagai bahan evaluasi keberlanjutan pembangunan daerah di masa mendatang. Dengan adanya evaluasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan di kemudian hari.

Berbagai program pembangunan daerah telah dicanangkan serta diwujudkan di Kabupaten Buleleng. Untuk mengetahui capaian berbagai program tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya dapat dilakukan dengan melihat potret kondisi masyarakat pada suatu rentang waktu tertentu. Pemotretan kondisi masyarakat tersebut selanjutnya dilakukan secara periodik dan berkesinambungan supaya pelaksanaan pembangunan dapat terpantau perkembangannya. Beberapa indikator

perlu diamati untuk mengukur capaian program-program pemerintah seperti indikator-indikator sosial dan ekonomi masyarakat. Indikator tersebut dapat disusun dalam suatu rangkaian data statistik yang merangkum keadaan-keadaan sosial suatu daerah sebagai gambaran kondisi kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu.

Tidak hanya untuk pemerintah, rangkaian data statistik tentang kondisi kesejahteraan masyarakat tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan seperti pihak swasta dan akademisi untuk berbagai keperluan peningkatan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Buku ini memuat rangkuman data statistik yang dapat menggambarkan kesejahteraan rakyat dari berbagai bidang, seperti bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, pola konsumsi, perumahan, kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

B. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun dengan menyajikan tabel dan grafik data serta uraian singkat yang menjelaskan data yang ada di dalamnya. Uraian dalam publikasi ini disajikan kedalam tujuh bagian dengan tema yang berbeda.

Bagian pertama memuat informasi kependudukan termasuk jumlah, laju pertumbuhan penduduk dan rasio jenis kelamin, komposisi dan kepadatan penduduk, perkawinan dan kepemilikan akte kelahiran dan NIK. Bagian kedua menyajikan potret kondisi kesehatan penduduk yang menyangkut derajat dan status kesehatan penduduk, fertilitas, tingkat imunitas dan gizi balita, fasilitas kesehatan dan pemanfaatannya, kepemilikan jaminan kesehatan serta kebiasaan merokok.

Pada bagian ketiga ditampilkan kondisi pendidikan penduduk fasilitas pendidikan, angka melek huruf, tingkat pendidikan dan partisipasi sekolah. Pola konsumsi disajikan pada bagian keempat. Selanjutnya, pada bagian kelima diuraikan informasi terkait perumahan menyangkut kualitas rumah tinggal, fasilitas rumah tinggal serta status kepemilikan rumah tinggal.

Pada bagian keenam diuraikan tentang kemiskinan menyangkut perkembangan penduduk miskin, karakteristik penduduk miskin, karakteristik pendidikan dan karakteristik ketenagakerjaan. Bagian akhir diuraikan tentang masalah sosial lainnya terdiri dari perjalanan wisata, penerimaan kredit usaha serta akses teknologi informasi dan komunikasi.



BAB II METODOLOGI

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

BAB II

METODOLOGI

A. Ruang Lingkup

Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Buleleng terus digenjut untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Buku Tinjauan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buleleng 2019 menggambarkan kondisi serta perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Buleleng selama tahun 2019.

Buku Tinjauan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buleleng 2019 ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Dinas Statistik Kabupaten Buleleng yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, dengan menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Pola Konsumsi, Perumahan, Kemiskinan, serta Kondisi Sosial Lainnya.

B. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng terdiri dari kerangka sampel untuk pemilihan kecamatan, kerangka sampel untuk

pemilihan blok sensus, dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga. Kerangka sampel untuk pemilihan kecamatan adalah daftar kecamatan dalam setiap kabupaten/kota yang telah diurutkan menurut letak geografis. Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perkotaan adalah daftar blok sensus yang dibedakan menurut blok sensus yang terletak di kota besar, kota sedang dan kota kecil di setiap kabupaten/kota. Untuk daerah perdesaan, pemilihan blok sensus menggunakan daftar blok sensus yang terdapat dalam setiap kecamatan terpilih.

C. Rancangan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng adalah rancangan sampel dua tahap untuk daerah perkotaan dan tiga tahap untuk daerah perdesaan. Pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan perdesaan dilakukan secara terpisah.

Untuk daerah perkotaan, pemilihan sampel tahap pertama dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara *linear systematic sampling*. Kemudian dari setiap blok sensus terpilih, dipilih sebanyak 10 rumah tangga juga secara *linear systematic sampling*.

Sedangkan untuk daerah perdesaan, pemilihan sampel tahap pertama dari kerangka sampel kecamatan dipilih sejumlah kecamatan secara *probability propotional to size*, dengan *size* banyaknya rumah tangga dalam kecamatan. Tahap kedua, sejumlah blok sensus dipilih dari setiap kecamatan terpilih secara *linear systematic sampling*. Tahap ketiga, daftar penduduk hasil pemutakhiran pada blok sensus terpilih menjadi kerangka sampel untuk pemilihan sampel rumah tangga secara *linear systematic sampling*.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai langsung secara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang ditujukan kepada individu diusahakan individu yang bersangkutanlah yang menjadi responden. Keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik yang ditanyakan dalam kuesioner.

E. Pengolahan Data

Proses pengolahan data diawali dengan proses perekaman data (*data entry*), pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (*konsistensi*) antar satu jawaban dengan jawaban yang lainnya pada pertanyaan yang berbeda.

F. Konsep dan Definisi

Dalam memahami data yang disajikan, berikut disajikan beberapa konsep/definisi dan batasan yang digunakan dalam Susenas dan Sakernas 2016 sebagai berikut :

1. Kependudukan

a. Penduduk

Penduduk adalah seseorang yang telah tinggal di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap di daerah tersebut.

b. Penduduk Indonesia

Semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap di wilayah tersebut.

c. Tipe Daerah

Untuk menentukan apakah suatu desa/kelurahan tertentu termasuk daerah perkotaan atau pedesaan digunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan). Skor atau nilai dari indikator gabungan ini didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel yakni kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian dan akses ke fasilitas umum.

d. Blok Sensus

Blok sensus merupakan daerah kerja dari seorang pencacah Susenans dan Sakernas 2018. Ada tiga jenis blok sensus yaitu :

1. Blok Sensus Biasa adalah blok sensus yang sebagian besar muatannya berkisar antara 80-120 rumah tangga atau bangunan tempat tinggal atau bangunan bukan tempat tinggal atau gabungan keduanya dan sudah jenuh.

2. Blok Sensus Khusus adalah bermuatan sekurang kurangnya 100 orang kecuali Lembaga Pemasarakatan, tempat-tempat yang bisa dijadikan blok sensus khusus antara lain : asrama militer, daerah perumahan militer dengan pintu keluar masuk yang dijaga, panti asuhan, asrama perawat,dsb.
3. Blok Sensus Persiapan adalah daerah yang kosong seperti sawah, kebun, tegalan, rawa, hutan, daerah yang dikosongkan (digusur) atau bekas pemukiman yang terbakar.

e. Rumah Tangga

Rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus.

1. Rumah Tangga Biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur (mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu).
2. Rumah Tangga Khusus yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasarakatan, rumah tahanan dan kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan

berjumlah 10 orang atau lebih. (Rumah tangga khusus tidak dicakup dalam Susenas dan Sakernas).

f. Anggota Rumah Tangga

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada saat pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan pindah tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.

g. Kepala Rumah Tangga

Kepala rumah tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut.

h. Rasio Jenis Kelamin (*sex ratio*)

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah Perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah

dan waktu tertentu. Rasio ini diperoleh melalui pembagian jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan kemudian dikalikan dengan 100 sebagai konstanta.

i. Status Perkawinan

1. Kawin adalah mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.
2. Cerai hidup adalah berpisah sebagai suami/istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum

pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.

3. Cerai mati adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

j. Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)

Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) adalah Perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif (penduduk 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk yang produktif (penduduk) umur 15-64 tahun.

2. Kesehatan

a. Keluhan kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit *kronis* dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

b. Terganggu Kegiatan

Terganggu kegiatan adalah tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, kegiatan sehari-hari) sebagaimana mestinya. Misalnya, kepala

rumah tangga yang tidak bekerja karena sakit, atau tidak dapat bekerja dengan kapasitas penuh seperti biasanya, anak kecil yang tidak bisa bermain karena sakit diare, dsb.

c. Angka Kesakitan/Morbiditas (*morbidity rate*)

Angka Kesakitan/Morbiditas (*morbidity rate*) merupakan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Angka Kesakitan dirumuskan dengan formula sebagai berikut :

$$AK = \frac{\text{Jumlah penduduk yg mengalami keluhan kesehatan sehingga terganggu aktifitas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

AK : Angka kesakitan

d. Rawat Jalan atau Berobat Jalan

Rawat jalan atau berobat jalan adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien.

e. Rawat Inap

Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk

mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional dengan menginap minimal 1 malam.

f. Fertilitas

Fertilitas adalah tingkat kesuburan wanita. Yaitu peluang bisa tidaknya dan berapa banyaknya bisa mengandung dan mempunyai anak

g. Usia Saat Perkawinan Pertama

Usia saat perkawinan pertama adalah usia pertama kali seseorang melakukan hubungan suami istri.

h. Wanita Usia Subur

Wanita usia subur adalah wanita yang masih dalam usia reproduktif, yaitu antara usia 15 – 49 tahun, dengan status belum menikah, menikah, atau janda (Depkes RI, 2004).

i. Jaminan kesehatan

Jaminan kesehatan adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

j. Merokok

Merokok merupakan aktifitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun pipa, pada sebulan terakhir sampai saat pencacahan. Terdapat 2 (dua) cara merokok yang umum dilakukan, yaitu pertama, menghisap lalu menelan asap rokok ke dalam paru-paru dan dihembuskan; kedua, hanya menghisap sampai mulut lalu dihembuskan melalui mulut atau hidung.

k. Imunisasi

Imunisasi didefinisikan sebagai suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terjangkit dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan

spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.

3. Pendidikan

a. Dapat membaca dan menulis

Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf latin/alfabet (a—z), huruf arab/hijaiyah, atau huruf lainnya (contoh huruf jawa, kanji, dll).

b. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca, menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya terhadap penduduk berusia 15 tahun ke atas.

c. Angka Buta Huruf

Angka Buta Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

d. Sekolah

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal dan informal (Paket A,B,C) mulai dari pendidikan

dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan/setara (MI/MTs/MA).

e. Tidak/belum pernah sekolah

Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD).

f. Masih bersekolah

Masih bersekolah adalah sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.

g. Tidak sekolah lagi

Tidak sekolah lagi adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

h. Tamat sekolah

Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

4. Pola Konsumsi

a. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran atau konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan konsumsi non makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk keperluan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran non makanan setahun dan sebulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun non makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

b. Pola Konsumsi

Pola konsumsi adalah kecenderungan rumah tangga/penduduk membelanjakan pendapatannya dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi untuk

penduduk tersebut, baik konsumsi makanan maupun non makanan.

c. Konsumsi Makanan

Konsumsi makanan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makanan termasuk makanan jadi, rokok dan tembakau.

d. Konsumsi Non Makanan

Konsumsi non makanan adalah biaya - biaya yang dikeluarkan untuk biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, aneka barang dan memperhatikan asal barang.

e. Gini Ratio (GR)

Gini ratio adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan suatu masyarakat di suatu daerah. GR merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan dengan nilai antara Nol sampai Satu. Bila GR sama dengan Nol berarti distribusi pendapatan amat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.

f. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah banyaknya bagian (porsi) pendapatan yang diterima oleh masing-masing rumah tangga / penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

5. Perumahan

a. Status Penguasaan bangunan tempat tinggal

1. Milik Sendiri, jika tempat tinggal tersebut betul-betul sudah menjadi milik kepala rumah tangga atau salah satu anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara kredit atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.
2. Kontrak adalah jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumahtangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayarannya biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak.
3. Sewa adalah jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT/ART dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

4. Bebas sewa adalah jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (baik famili/bukan family/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh rutatanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
5. Dinas adalah jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu ART baik dengan membayar maupun tidak.
6. Lainnya adalah jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan kedalam salah satu kategori diatas, misalnya tempat tinggal milik bersama, atau rumah adat.

b. Luas lantai

Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung).

c. Fasilitas tempat buang air besar

Fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh ruta responden.

1. Sendiri, bila fasilitas tempat buang air besar hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.
2. Bersama, bila fasilitas tempat buang air besar digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa ruta tertentu.
3. MCK Komunal (Mandi Cuci Kakus Komunal) adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencucui, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah
4. Umum, bila fasilitas tempat buang air besar dapat digunakan oleh setiap ruta, termasuk ruta responden.
5. Tidak ada, bila ruta reponden tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar.

d. Jenis Kloset

Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus. Ada beberapa jenis:

1. Kloset leher angsa adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.
2. Kloset plengsengan adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.
3. Kloset plengsengan dengan tutup adalah kloset plengsengan yang ditutup bila tidak digunakan dan dibuka bila digunakan.
4. Kloset plengsengan tanpa tutup adalah kloset plengsengan yang tidak menggunakan tutup
5. Kloset cemplung/cubluk adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan tinja.
6. Tidak pakai kloset adalah jika fasilitas buang air besar rata tidak ada kloset.

e. Pembuangan Akhir Tinja

1. Tangki adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya baik mempunyai bak resapan maupun tidak.
2. SPAL (Sistem Pembuangan Air Limbah) terpadu. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah ruta tidak ditampung dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair.
3. Kolam/sawah/sungai/danau/laut
4. Lubang tanah, bila limbahnya dibuang kedalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air)
5. Pantai/tanah lapang/kebun, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.
6. Lainnya, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan diatas.

f. Sumber Air Minum utama yang digunakan oleh rumah tangga

Dalam hal ini, yang ditanyakan adalah sumbernya. Jika ruta responden mendapatkan air dari mata air

yang disalurkan sampai ke rumah, maka sumber airnya adalah mata air. Beberapa jenis sumber air minum:

1. Air kemasan bermerk

Air kemasan bermerk adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol dan kemasan gelas.

2. Air Isi Ulang

Air Isi Ulang adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merk.

3. Leding

Leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).

4. Mata air

Mata air adalah sumber air permukaan di mana air timbul dengan sendirinya

5. Air sumur/perigi terlindung

bila lingkaran mulut sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit setinggi 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut sumur atau perigi.

g. Air minum layak dan bersih

Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

6. Kemiskinan

a. Perkembangan penduduk miskin

Pembahasan kemiskinan tidak dapat mengabaikan Garis Kemiskinan (GK) yang digunakan BPS sebagai ukuran dalam menentukan seseorang tergolong sebagai penduduk miskin atau bukan. Garis

kemiskinan senantiasa mengalami kenaikan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan maupun non makanan.

b. Karakteristik penduduk miskin

Karakteristik yang dimaksud adalah pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Dengan mengetahui bagaimana karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin, diharapkan dapat dihasilkan suatu kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

c. Karakteristik pendidikan

Pendidikan merupakan suatu sarana yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Dengan pendidikan yang tinggi, tentunya seseorang akan menjadi lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi pula. Untuk menggambarkan potret kemiskinan dapat menggunakan indikator pendidikan seperti kemampuan membaca dan menulis, partisipasi sekolah, serta jenjang pendidikan yang ditamatkan.

d. Karakteristik ketenagakerjaan

Kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat pendapatan. Pada umumnya, penduduk miskin tidak memiliki pekerjaan ataupun memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang rendah. Salah satu indikator yang mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga adalah lapangan usaha atau sektor pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan utama.

7. Sosial Lainnya

a. Perjalanan Wisata

Perjalanan wisata menurut konsep Susenas Kor adalah perjalanan yang dilakukan penduduk Indonesia dalam wilayah geograis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dan tidak bertujuan untuk sekolah, bekerja (memperoleh upah/gaji) di tempat yang dituju, untuk mengunjungi tempat wisata komersial, dan atau menginap di usaha jasa akomodasi, dan atau jarak perjalanan pulang pergi sama atau lebih dari 100 kilometer. Perjalanan wisata dimaksud bersifat perjalanan bukan rutin dengan tujuan utama untuk berlibur/rekreasi atau olah raga/kesenian.

b. Penerima Kredit Usaha

Kredit usaha bila dilihat berdasarkan penggunaan dana pinjaman dapat berupa Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi. Kredit Modal kerja digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasional bisnis, sedangkan Kredit Investasi diarahkan pada pengadaan barang modal jangka panjang dalam ekspansi tersebut

c. Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi salah satu pendorong globalisasi dan pesatnya pertumbuhan ekonomi. Kemajuan suatu bangsa di era informasi ini sangat tergantung pada kesediaan infrastruktur dan akses TIK untuk mendorong pergerakan sektor ekonomi. Infrastruktur membantu konektivitas antar wilayah satu dengan wilayah lain secara cepat dan luas.



BAB III

PEMBAHASAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kependudukan

Ketika membahas mengenai pembangunan di suatu daerah tentunya masalah kependudukan menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan, mengingat penduduk merupakan objek sekaligus subjek dari proses pembangunan tersebut. Sebagai objek pembangunan, pemantauan terhadap kondisi kependudukan diperlukan untuk mengetahui perkembangan kondisi kesejahteraan mereka. Sebagai subjek pembangunan, pemantauan terhadap data kependudukan diperlukan untuk mengetahui potensi dan tantangan pembangunan di masa yang akan datang. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya yang sangat menunjang pembangunan apabila dikelola dengan baik. Sebaliknya, besaran jumlah penduduk justru akan menjadi beban pembangunan apabila tidak dapat diberdayakan dengan baik.

Menurut data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 penduduk Kabupaten Buleleng sebanyak 657.200 jiwa, terdiri dari 327.300 jiwa laki-laki dan 329.900 jiwa perempuan. Jumlah tersebut menempatkan

Buleleng sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kota Denpasar. Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Buleleng sebesar 99,21. Artinya, diantara 10.000 orang penduduk perempuan terdapat 9.921 penduduk laki-laki. Dengan Kepadatan Penduduk sebesar adalah 481,16 jiwa/km².

Apabila dilihat berdasarkan pembagian menurut kelompok umur (Tabel 3.2), penduduk Kabupaten Buleleng paling banyak berada pada umur muda. Penduduk yang berada pada kelompok umur muda (15-64 tahun) dianggap mempunyai potensi besar untuk mencari penghidupan, sedangkan penduduk usia dibawah 15 tahun dianggap belum produktif karena masih bergantung kepada orangtuanya. Selain itu, penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) juga dianggap sudah tidak produktif lagi karena kondisi fisik tidak lagi sekuat penduduk muda. Angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Buleleng sebesar 49,68 persen. Artinya, Angka ketergantungan penduduk Buleleng ini dapat dikatakan cukup bagus, dimana dapat disimpulkan bahwa 2 penduduk

produktif di Kabupaten Buleleng akan menanggung 1 penduduk yang tidak/belum produktif.

Sebanyak 74,76 persen dari penduduk Kabupaten Buleleng telah mencapai usia kerja, yakni 15 tahun keatas. Hal ini menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng. Sedangkan apabila dikelompokkan menurut kelompok usia subur, setengah dari penduduk perempuan di Kabupaten Buleleng masuk pada kelompok wanita usia subur (WUS). Kelompok wanita usia subur ini juga dirasa perlu mendapatkan perhatian, mengingat bahwa mereka adalah agen pencetak generasi penerus yang juga menjadi kunci penting keberhasilan pembangunan daerah.

Komposisi penduduk menurut status perkawinan di Kabupaten Buleleng (Tabel 3.3), menunjukkan bahwa penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin lebih besar (34,70 persen) dibanding penduduk perempuan (27,84 persen). Hal ini mengingat bahwa laki-laki wajarnya bertugas sebagai pencari nafkah keluarga, sehingga mereka cenderung menyiapkan diri dan bekal finansial yang baik sebelum mereka memutuskan untuk menikah. Sementara itu penduduk perempuan yang berstatus janda (cerai hidup dan cerai mati) sebesar 11,21 persen, lebih tinggi dibandingkan

penduduk laki-laki yang berstatus duda (cerai hidup dan cerai mati) yaitu hanya 4,56 persen.

Tabel 3.1. Indikator Kependudukan Kabupaten Buleleng,2018

Indikator	Nilai
<i>1</i>	<i>2</i>
Jumlah Penduduk	657.200 jiwa
- Laki-laki	327.300 jiwa
- Perempuan	329.900 jiwa
Sex Ratio	99,21
Luas Wilayah	1.365,88 km ²
Kepadatan Penduduk	481,16 jiwa/Km ²

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Buleleng

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Buleleng, 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
0-4	7,85	7,52	7,68
5-9	8,55	8,15	8,35
10-14	9,53	8,82	9,18
15-19	8,80	7,79	8,29
20-24	7,03	6,76	6,89
25-29	6,90	6,61	6,76
30-34	6,72	6,27	6,50
35-39	6,32	6,37	6,35
40-44	6,94	7,37	7,15
45-49	7,64	8,06	7,85
50-54	7,39	7,73	7,56
55-59	5,32	5,52	5,42
60-64	3,85	4,33	4,09
65-69	2,93	3,30	3,12
70-74	2,11	2,49	2,30
75+	2,11	2,91	2,51
Jumlah	100,00	100,00	100,00

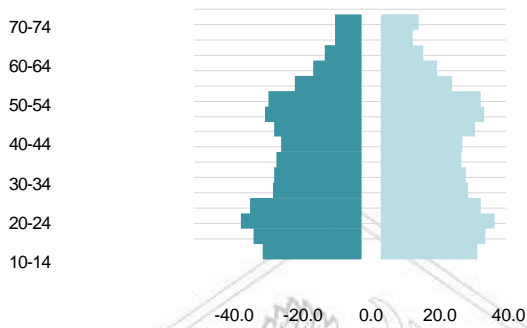
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Buleleng

Tabel 3.3. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Kabupaten Buleleng, 2018

Kelompok Perkawinan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Belum Kawin	34,70	27,84	31,3
Kawin	60,74	60,95	60,8
Cerai	4,56	11,21	7,9
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Buleleng

Gambar 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Buleleng



B. Kesehatan

Meningkatkan kualitas kesehatan penduduk selalu menjadi prioritas bagi para pemangku pemerintahan di wilayah manapun. Hal ini wajar, mengingat kesehatan merupakan faktor utama penunjang pembangunan manusia. Dengan memperhatikan faktor kesehatan, diharapkan penduduk dapat melakukan aktifitas yang produktif dengan lebih baik. Tentunya, hal ini mampu mendongkrak produktifitas masyarakat sehingga nantinya juga membawa dampak baik bagi pembangunan daerah. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, sehingga diharapkan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar semua anggota keluarga mau berperilaku hidup sehat; penyediaan berbagai fasilitas umum seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa, serta penyediaan fasilitas air bersih, dan sebagainya.

Salah satu ukuran untuk memantau derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan penduduk

(*morbidity rate*) yang menggambarkan seberapa banyak penduduk yang sakit sehingga terganggu aktifitasnya sehari-hari. Beberapa orang yang mengalami keluhan kesehatan tidak merasa terganggu karena keluhan tersebut. Dalam cakupan ini, seseorang dikatakan sedang sakit ketika keluhan kesehatan yang dialaminya mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari-hari.

Upaya memberdayakan penduduk di suatu daerah salah satunya melalui program pengendalian pertumbuhan penduduk. Hal ini perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas masa depan generasi penerus mulai dari awal kehidupannya. Ketika jumlah anak yang dimiliki oleh masing-masing rumah tangga dapat terkendali, upaya selanjutnya adalah memperbaiki kehidupan awalnya, baik kondisi kesehatan maupun kecukupan gizinya. Hal ini tentunya terkait erat dengan pengamatan terhadap pola fertilitas dan implementasi keluarga berencana di kalangan masyarakat.

Tingkat fertilitas seorang perempuan dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya usia perkawinan pertama, faktor genetik tingkat kesuburan, prevalensi penggunaan alat/cara KB, dan lain sebagainya. Usia perkawinan pertama, bagi perempuan sangat berpengaruh terhadap resiko

melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan melahirkan, baik keselamatan ibu maupun anak. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh kondisi rahim perempuan muda yang belum matang untuk proses berkembangnya janin. Selain itu, juga karena kesiapan mental menghadapi masa kehamilan/melahirkan yang belum memadai bagi perempuan muda. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia perkawinan pertama (melebihi usia yang dianjurkan dalam program KB), juga semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan, melahirkan, dan masa nifas.

Seorang perempuan memasuki masa usia subur ketika mereka berusia 15 - 49 tahun. Pada rentang usia tersebut kemungkinan perempuan melahirkan anak cukup besar karena kondisi alat reproduksi yang masih bagus. Perempuan yang berada pada kelompok usia ini disebut sebagai Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) bagi yang berstatus kawin.

Meningkatnya jumlah PUS juga akan meningkatkan peluang jumlah anak yang dilahirkan. Semakin banyak jumlah anak berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan

sosial anggota rumah tangganya. Dengan demikian pembatasan jumlah anak perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera, tidak hanya baik secara kuantitas tetapi juga baik secara kualitas. Oleh karena itu, program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan oleh pemerintah perlu dipantau keberlanjutannya untuk menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk.

Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Kab. Buleleng 2018 (Tabel 3.4) menunjukkan bahwa persentase belum kawin sebesar 31,3 persen dan kawin 60,8 persen sedangkan persentase cerai sebesar 7,9 persen.

Menurut tempat melahirkan Persentase Perempuan yang Pernah Kawin di Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 (Tabel 3.5). Tempat melahirkan yang dominan dipilih adalah Rumah Sakit Pemerintah/Rumah sakit Swasta sebesar 38,11 persen, Rumah Bersalin/Klinik 31,48 persen, Praktek tenaga Kesehatan 23,27 persen sisanya sebesar 7,14 Persen di Puskesmas/Polindes/Pustu. Untuk proses melahirkan sudah semua dibantu oleh tenaga medis, berdasarkan Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran, Kabupaten Buleleng Tahun 2018, kebanyakan dibantu oleh Bidan sebesar 55,49 persen, Dokter Kandungan

43,92 persen sisanya sebesar 0,59 persen dibantu Dokter Umum.(Tabel 3.6)

Tabel 3.4.Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Kab. Buleleng, 2018

Status Perkawinan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Belum Kawin	34,70	27,84	31,3
Kawin	60,74	60,95	60,8
Cerai	4,56	11,21	7,9
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Buleleng

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Tabel 3.5. Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Tempat Melahirkan, Kabupaten Buleleng, 2018

Tempat Melahirkan	% (Laki-laki + Perempuan)
<i>1</i>	<i>2</i>
RS Pemerintah / RS Swasta	38,11
Rumah Bersalin / Klinik	31,48
Praktek Nakes	23,27
Puskesmas/Polindes/Pustu	7,14
Rumah	0,00
Lainnya	0,00
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali

Tabel 3.6. Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran, Kab. Buleleng 2018

Penolong Proses Kelahiran	%
<i>1</i>	<i>2</i>
Dokter Kandungan	43,92
Dokter Umum	0,59
Bidan	55,49
Tenaga Kesehatan Lainnya	0,00
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali

Diantara penduduk Kabupaten Buleleng yang mengalami sakit menurut lebih dari 3 hari rawat inap sebesar 63,90 persen kurang/sampai 3 hari sakit sisanya 36,10 persen lebih dari 3 hari sakit (Tabel 3.7) , serta sebagian besar dari mereka yang tidak berobat jalan memilih untuk mengobati sendiri 63,61 persen dan beberapa beralasan karena merasa tidak perlu berobat 32,67 persen.

Namun yang perlu dicermati, terdapat 0,67 persen dari penduduk memberikan alasan karena tidak mempunyai biaya berobat, 0,21 persen karena tidak ada sarana transport ke fasilitas kesehatan, 0,41 persen karena tidak ada biaya transport serta 2,24 persen menyatakan karena waktu tunggu pelayanan lama dan alasan lainnya sebesar 0,18 persen (Tabel 3.8)

Tabel 3.7. Prosentase Penduduk yang pernah Rawat Inap menurut Lamanya Rawat Inap, Kab. Buleleng, 2018

Lama Rawat Inap	Jenis Kelamin
	Laki-laki + Perempuan
1	2
≤3	36,10
4 – 6	20,56
7 – 29	39,87
≥30	3,47
Jumlah	100,00

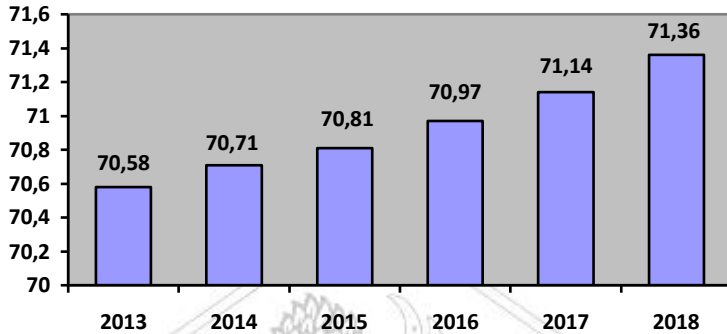
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali

Tabel 3.8. Prosentase Penduduk menurut Alasan Tidak Berobat Jalan, Kab. Buleleng, 2018

Alasan Tidak Berobat Jalan	Jenis Kelamin
	Laki-laki + Perempuan
1	2
Tidak Punya Biaya Berobat	0,67
Tidak Ada Sarana Transportasi	0,21
Tidak Ada Biaya Transportasi	0,41
Waktu Tunggu Pelayanan Lama	2,24
Mengobati Sendiri	63,61
Tidak Ada yang Mendampingi	0,00
Merasa Tidak Perlu	32,67
Lainnya	0,18
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali

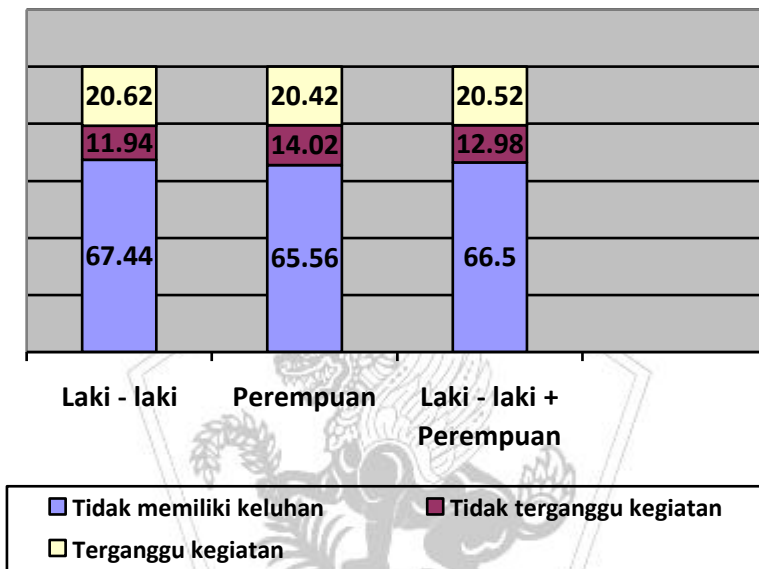
Gambar 3.2. Angka Harapan Hidup Kabupaten Buleleng, 2013 -2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Gambar 3.3. Penduduk Kab. Buleleng Menurut Terganggunya Kegiatan akibat Keluhan Kesehatan Kab. Buleleng, 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng

C. Pendidikan

Pendidikan merupakan modal utama untuk mewujudkan generasi yang berkualitas dalam upaya mempertahankan keberlanjutan pembangunan daerah. Pendidikan merupakan sebuah sarana untuk membentuk manusia yang terampil dan produktif sehingga dapat mencapai kehidupan yang sejahtera. Pada dasarnya

pendidikan merupakan salah satu upaya manusia untuk meningkatkan kualitas dirinya menuju pribadi yang dewasa, mandiri, dan berdaya guna. Pada masa sekarang ini sebagian besar penduduk telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pendidikan. Tingginya kesadaran ini tentunya harus diimbangi dengan pemerataan fasilitas dan kesempatan bagi semua penduduk

Bagian ini menyajikan beberapa indikator pendidikan yang menggambarkan keadaan capaian pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Buleleng seperti: partisipasi penduduk di bidang pendidikan, status pendidikan, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan tingkat melek huruf penduduk.

Pada tingkat makro, capaian tingkat pendidikan di suatu daerah dapat ditinjau melalui kemampuan baca tulis penduduknya, atau yang biasa dikenal dengan indikator Angka Melek Huruf. Pada cakupan penduduk usia muda, indikator ini dirasa masih cukup efektif untuk menggambarkan secara umum tingkat pendidikan masyarakat. Pada kelompok penduduk umur 7 sampai 18 tahun, hampir seluruh penduduk Kabupaten Buleleng (98,50 persen) telah memiliki kemampuan baca dan tulis. Hanya terdapat 1,50 persen saja yang buta huruf, termasuk salah

satunya mereka yang belum bisa membaca dan menulis karena cacat.

Penyediaan fasilitas infrastruktur pendidikan tentunya telah dilakukan oleh pemerintah. Namun apakah ketersediaan fasilitas tersebut telah mampu menampung seluruh penduduk usia sekolah secara merata di seluruh pelosok Kabupaten Buleleng, itu menjadi tantangan yang harus dijawab guna meningkatkan capaian pendidikan daerah. Salah satu indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana penduduk usia sekolah dapat mengenyam pendidikan adalah indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang menunjukkan partisipasi sekolah pada berbagai jenjang dan kelompok umur pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

merupakan perbandingan antara penduduk usia sekolah yang masih bersekolah dengan penduduk usia sekolah.

APS biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah yakni kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Secara matematis, APS untuk kelompok umur 7 – 12 tahun dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut: penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah (pada jenjang pendidikan apapun) dibagi jumlah seluruh

penduduk usia 7-12 tahun kemudian dikalikan dengan 100 sebagai konstanta. Begitu pula halnya dengan penghitungan pada kelompok umur lainnya.

Pada tahun 2018, Angka Partisipasi Sekolah untuk kelompok umur 7-12 tahun di Kabupaten Buleleng sudah mencapai 100 persen, artinya dari seratus anak usia 7 – 12 tahun yang ada di Kabupaten Buleleng semua anak yang bisa aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. APS umur 13-15 tahun di Kabupaten Buleleng sebesar 94,39 persen artinya masih ada 5,61 persen anak umur 13-15 tahun yang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. APS pada kelompok umur 16-18 tahun lebih kecil daripada APS kelompok umur 13-15 tahun, yakni hanya 80,43 persen. Hal ini masih dirasa wajar mengingat jumlah fasilitas pendidikan pada jenjang SMA yang lebih terbatas jumlahnya daripada fasilitas pendidikan SMP (tabel 3.9).

DINAS STATISTIK

tabel 3.9. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2018

Kelompok Usia	Tahun		
	Laki - laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
7 – 12 tahun	100,00	100,00	100,00
13 – 15 tahun	95,76	93,02	94,39
16 – 18 tahun	75,56	85,29	80,43

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Buleleng

Pada tabel diatas tampak bahwa mulai kelompok umur 7-12 tahun, semakin tinggi jenjang pendidikan maka nilai APS semakin kecil. Apabila dibandingkan menurut jenis kelamin, pada kelompok umur 16-18 tahun APS laki-laki cenderung lebih besar daripada APS perempuan. Pola berbeda kita jumpai pada APS kelompok 16-18 tahun, dimana tingkat partisipasi perempuan pada kelompok umur tersebut lebih besar dibandingkan dengan partisipasi laki-

laki. Hal ini juga perlu diperhatikan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan sehingga misi untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Buleleng dapat tercapai.

Angka Partisipasi Murni (APM)

merupakan proporsi anak pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya, APM SD diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{APM SD} = \frac{\text{Jumlah Murid SD Usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun}} \times 100$$

Indikator APM pada umumnya digunakan untuk melihat sejauh mana anak-anak usia sekolah bersekolah secara tepat waktu sesuai dengan umur mereka dan juga bisa diterapkan sesuai jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Dengan demikian angka APM akan selalu lebih kecil atau maksimal sama dengan APS dan pada dasarnya APM tidak memberikan analisa yang berbeda dari APS.

Berdasarkan data tahun 2018, APM SD tercatat sebesar 94,30 persen, artinya dari setiap 100 penduduk usia 7-12 tahun terdapat sekitar 94 orang yang bersekolah di jenjang Sekolah Dasar. APM SMP Kabupaten Buleleng tercatat sebesar 83,35 persen, berarti setiap 100 orang

penduduk usia 13-15 tahun terdapat sekitar 83 orang yang aktif bersekolah di jenjang SMP. Sedangkan APM SMA/MK/MA baru tercatat sebesar 79,40 persen atau baru sekitar 79 orang usia 16-18 tahun dari 100 penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang SMA (tabel 3.10).

Tabel 3.10. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Kab. Buleleng, 2018

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
SD	95.40	93.21	94.30
SMP	82.96	83.75	83.35
SMA	74.67	84.13	79.40

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Statistik

Angka Partisipasi Kasar (APK)

merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dengan kelompok umur tersebut. Tidak berbeda dengan APS dan

APM, APK juga dibedakan menurut jenjang dan secara matematis diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{APK - SD} = \frac{\text{Jumlah Murid di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun}} \times 100$$

Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SD dibagi penduduk usia 7-12 tahun dikali 100. APK pada umumnya digunakan untuk melihat bagaimana kondisi murid pada suatu jenjang pendidikan. Kalau APS dan APM melihat penduduk usia sekolah sesuai jenjang pendidikannya, maka APK melihat penduduk pada jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat usia mereka. Untuk APK SD, yang diperhatikan adalah murid SD dibandingkan dengan penduduk usia SD demikian juga APK SMP dan SMA. Dari data tahun 2018 nampak APK SD di Kabupaten Buleleng sebesar 100,87 persen artinya penduduk yang bersekolah di jenjang SD tidak hanya mereka yang berumur 7-12 tahun, terdapat sekitar 0,87 persen murid SD berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun yang masih terdaftar dan aktif di jenjang Sekolah Dasar.

Tabel 3.11. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kab. Buleleng 2018

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
SD	102.65	99.76	101.20
SMP	93.09	97.78	95.43
SMA	86.78	99.52	93.15

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Buleleng

Untuk meninjau kualitas pendidikan formal, kepemilikan ijazah/STTB tertinggi merupakan indikator yang penting untuk dipertimbangkan. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk suatu daerah mencerminkan taraf intelektualitas daerah tersebut dapat dikatakan lebih baik. Selain itu semakin banyak penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan SMA ke atas, maka semakin baik pula kualitas SDM daerah tersebut. Pada tabel 3.12 dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Buleleng usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum memiliki ijazah/STTB

sebesar 21,38 persen. Persentase terbesar adalah kelompok penduduk yang memiliki ijazah terakhir SLTA sederajat , yakni sebanyak 25,74 persen. Selanjutnya, terdapat 25,16 persen penduduk yang memiliki ijazah tertinggi SD.

Tabel 3.12. Prosentase Penduduk 15 tahun keatas menurut Ijazah Tertinggi yang dimiliki dan Jenis Kelamin, Kab. Buleleng, 2018

Indikator	Jenis Kelamin
	Laki-laki + Perempuan
1	2
Tidak Punya Ijazah	21,38
SD Sederajat	25,16
SLTP Sederajat	20,91
SLTA Sederajat	25,74
D-I / D-II / D-III	1,30
D-IV / S1 / S2 / S3	5,52

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali

D. Pola Konsumsi

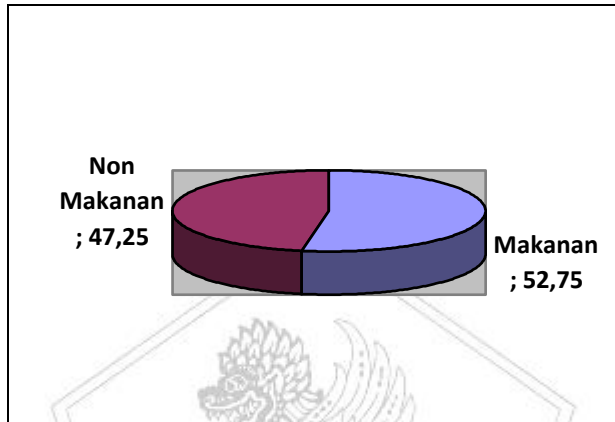
Selain memantau laju pertumbuhan ekonomi, memastikan pemerataan pendapatan bagi seluruh penduduk juga merupakan hal yang sangat penting. Mencegah terjadinya ketimpangan atau paling tidak meminimalisir jarak pendapatan antara penduduk kaya dan penduduk miskin merupakan suatu tantangan tersendiri dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Data Tahun 2018 menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Kabupaten Buleleng menghabiskan 47,25 persen pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan non makanan rumah tangga, dan 52,75 persen sisanya untuk memenuhi kebutuhan makanan. Konsumsi makanan meliputi beras, umbi-umbian, daging/ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, susu dan telur, bahan minuman, tembakau sirih dan rokok dan makanan jadi lainnya; sedangkan konsumsi non/bukan makanan meliputi kelompok perumahan, aneka barang dan jasa, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pengeluaran alas kaki, pakaian, tutup kepala, barang tahan lama, pajak/asuransi dan pengeluaran pesta/upacara agama/adat. Berdasarkan hasil estimasi, rata-rata pengeluaran penduduk per kapita di Kabupaten Buleleng tahun 2018 mencapai 950.532 rupiah.

Artinya, secara rata-rata, setiap penduduk Kabupaten Buleleng menghabiskan paling tidak sebanyak 950.532 rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan makanan maupun non makanan.

Konsumsi makanan pada suatu titik akan menjadi statis karena telah mencapai titik kulminasi/kepuasan, sementara konsumsi bukan/non makanan akan terus berkembang mengikuti tingkat pendapatan penduduk dan juga perkembangan zaman dan teknologi. Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat pula diukur melalui proporsi besarnya konsumsi/pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanannya. Semakin besar porsi konsumsi/pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan dibandingkan porsi pada konsumsi/pengeluaran untuk makanan, dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan lebih baik. Sebaliknya, apabila porsi untuk pengeluaran makanan lebih besar daripada porsi pengeluaran untuk bukan makanan, artinya rumah tangga tersebut masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok/primer dan belum mampu untuk memikirkan lebih banyak pada pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier.

Gambar 3.4. Perbandingan Konsumsi Makanan dan Non Makanan Kabupaten Buleleng, 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Buleleng

Ketimpangan pendapatan di suatu daerah dapat dipantau melalui indikator *Gini Ratio* (Indeks Gini) yang menggambarkan seberapa jauh jarak pendapatan yang dimiliki oleh kelompok penduduk berpenghasilan tinggi dan kelompok penduduk berpenghasilan rendah. Pada tahun 2018, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Buleleng sedikit menurun dibandingkan tahun 2016, artinya jarak antara penduduk kaya dan penduduk miskin di Kabupaten Buleleng semakin kecil. Pada tahun 2016 Indeks Gini Kabupaten Buleleng sebesar 0,3373 sedangkan tahun 2018 Indeks Gini Rationya 0,3100. Berdasarkan besarnya indeks tersebut, Kabupaten Buleleng dapat dikatakan berada pada

kategori ketimpangan sedang. Jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi biasanya dinikmati oleh kelompok penduduk berpendapatan tertinggi. Pada masa yang akan datang, pemerataan pendapatan di kalangan penduduk menjadi salah satu tujuan utama pembangunan Kabupaten Buleleng agar kesejahteraan umum dapat tercapai.

Pada tahun 2018, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah di Kabupaten Buleleng dapat menikmati 19,84 persen dari seluruh pendapatan daerah. Sedangkan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi menikmati 43,00 persen dari pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 Kabupaten Buleleng berada pada ketimpangan rendah, bahkan apabila dibandingkan dengan ketimpangan pada tahun 2017 ketimpangan ini sudah jauh lebih baik. Artinya, jarak antara kelompok kaya dan kelompok miskin semakin menyempit.

Tabel 3.13. Indikator Konsumsi Kabupaten Buleleng, 2018

Indikator	Nilai (Rp.)	Prosentase (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Pola Konsumsi :		
Rata – rata Perkapita/bulan:		
Makanan	501.445,00	52,75
Non Makanan	449.087,00	47,25
Rata – rata Konsumsi per kapita/bulan (total pengeluaran)	950.532,00	100,00
Distribusi Pendapatan:		
40% Terbawah		19,84
40% Tengah		37,16
20% Teratas		43,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Buleleng

E. Perumahan

Pola hidup masyarakat memang sangat berpengaruh terhadap mutu kesehatan dan kualitas hidupnya. Diluar dari itu, kesehatan lingkungan juga menjadi faktor eksternal yang juga turut andil mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, kondisi perumahan juga dapat dijadikan salah satu dimensi kesejahteraan rumahtangga. Oleh karenanya, data tentang perumahan diperlukan untuk mendapatkan gambaran kelayakan dan kesehatan rumah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Data hasil pendataan Susenas salah satunya memuat informasi penting mengenai keadaan perumahan, antara lain: status penguasaan bangunan tempat tinggal, luas lantai, jenis lantai, jenis atap, jenis dinding, sumber penerangan, fasilitas air minum, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sebagainya.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 menempati rumah dengan menggunakan atap seng (49,58 persen), genteng (42,77 persen) sisanya menggunakan asbes, beton dan atap lainnya. Meski demikian, masih terdapat penduduk yang tinggal di rumah yang luasnya kurang dari 20 m². Apabila ditinjau dari luas lantai per kapita yang digunakan oleh masing-masing

anggota rumah tangga, mayoritas penduduk Buleleng (96,65 persen) dapat menguasai lebih dari 20 m² dari luas lantai rumahnya. Namun terdapat 9,26 persen penduduk yang menguasai ruang gerak seluas 7,3 – 9,9 m² dan 83,08 persen penduduk yang menguasai ruang gerak lebih dari 10 m² persen sisanya 7,66 persen hanya mendapatkan ruang gerak seluas kurang dari 7,2 m². Luas perkapita adalah luas lantai rumah dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga (ART). Dengan asumsi setiap rumah tangga terdiri dari 5 art dan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang perumahan, luas hunian minimum rumah adalah 36 m², maka luas minimum perkapita adalah 7,2 m². Luas lantai per kapita ini dapat menjadi salah satu gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat karena kecukupan ruang gerak manusia akan sangat mempengaruhi kualitas kesehatannya. Selain itu, jenis bahan utama yang digunakan sebagai lantai rumah juga penting untuk diperhatikan untuk menunjang aktifitas rumah tangga sehari-hari. Ditinjau dari jenis lantai rumah, lebih dari setengah penduduk Buleleng (54,04 persen) telah menggunakan keramik sebagai lapisan lantai rumahnya. Bahan lain yang juga banyak digunakan untuk melapisi lantai rumah adalah semen/bata merah, yakni sebanyak 36,75 persen.

Kualitas perumahan jika dikaji menurut jenis dinding rumahnya, semakin tinggi nilai/kualitas dinding rumah penduduk, dapat dikatakan semakin sejahtera tingkat kehidupannya. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, budaya masyarakat dan tersedianya bahan baku. Pada Tabel 3.13 terlihat bahwa 93,87 persen rumah penduduk di Kabupaten Buleleng telah menggunakan tembok sebagai dinding rumah, walaupun masih terdapat rumah yang menggunakan dinding dari kayu/bambu/lainnya sebesar 6,13 persen.

Pengelolaan limbah rumah tangga dengan baik merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan, sebanyak 62,84 persen rumah tangga di Kabupaten Buleleng telah memiliki fasilitas buang air besar sendiri, kemudian sebanyak 37,16 persen menggunakan fasilitas buang air besar bersama, seperti mck komunal/umum, sebagian kecil dari rumah tangga di Kabupaten Buleleng mengaku belum memiliki fasilitas buang air besar sehingga harus menggunakan sarana-sarana umum seperti pantai, sungai, ataupun tanah lapang sebagai fasilitas buang air besar. Mayoritas jenis kloset yang digunakan oleh penduduk Kabupaten Buleleng adalah kloset

jenis leher angsa (97,94 persen), sedangkan sebagian kecil sisanya menggunakan plengesengan, cemplung, maupun cubluk.

Limbah yang berasal dari kotoran manusia, binatang, limbah rumah tangga dan industri merupakan sumber penyakit apabila tidak dikelola dengan baik. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 97,58 persen dari rumah tangga di Kabupaten Buleleng telah menggunakan tangki septik (*septic tank*) sebagai tempat penampungan akhir tinja. Metode penampungan tinja yang lebih baik, yakni SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah), sedangkan sisanya 2,42 persen membuang tinja ke kolam, sawah, sungai, danau, laut, lubang tanah, pantai, tanah lapang, maupun kebun.

Kepedulian terhadap jarak sumber air tanah (sumber air minum yang berasal dari pompa, sumur atau mata air) ke tempat penampungan kotoran sangat diperlukan agar air yang dikonsumsi rumah tangga terhindar dari kemungkinan kontaminasi oleh kuman dan kotoran, terutama rumah tangga yang biasa meminum air yang tidak berasal dari air leding (PDAM) misalnya air dari mata air, sumur bor/sumur gali, maupun air permukaan. Jarak antara sumber air dengan tempat pembuangan kotoran yang dianjurkan adalah lebih dari 10 meter, semakin jauh jarak penampungan kotoran tersebut dengan sumber air minum,

semakin kecil kemungkinan tercemarnya air yang digunakan rumah tangga. Berdasarkan data pada tahun 2018, lebih dari setengah rumah tangga di Kabupaten Buleleng (56,74 persen) sudah menggunakan air kemasan bermerk, air isi ulang maupun air leding meteran/eceran sisanya 43,26 persen masih menggunakan air minum yang berasal dari sumur, mata air, dan air permukaan, baik yang terlindung maupun yang tidak terlindung.

Salah satu indikator perumahan yang biasanya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah jenis bahan bakar yang biasanya digunakan untuk memasak sehari-hari. Berdasarkan data pada tahun 2018, penggunaan bahan bakar untuk memasak sebagian besar masyarakat di Kabupaten Buleleng adalah LPG (66,98 persen) dan kayu bakar (30,64 persen). Penggunaan LPG memang sudah umum dijumpai di masyarakat, namun prevalensi terhadap kayu bakar juga masih banyak dijumpai, terutama di daerah perdesaan yang masih terdapat banyak lahan pertanian, kebun, atau hutan. Masyarakat di daerah-daerah tersebut lebih memilih memasak menggunakan kayu bakar karena mereka hanya perlu mencari kayu di kebun ataupun hutan tanpa membayar/membeli. Beberapa rumah tangga di Kabupaten Buleleng menggunakan listrik untuk memasak sehari-hari, yakni 1,21 persen. Hal ini biasanya terjadi pada

rumah tangga yang tidak pernah memasak sayur (membeli) dan hanya memasak nasi menggunakan alat penanak nasi elektronik. Selain itu, sebagian kecil rumah tangga di Kabupaten Buleleng (0,00 persen) memanfaatkan biogas sebagai bahan bakar utama untuk memasak.

Tabel 3.14. Persentase Rumah Tangga Menurut Atap Rumah Kabupaten Buleleng, 2018

Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas	Persentase Rumah Tangga (%)
1	2
Beton	1,39
Genteng	42,77
Asbes	6,05
Seng	49,58
Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia	0,21
Lainnya	0,00
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali

Tabel 3.15. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal Kabupaten Buleleng, 2018

Luas Lantai (m2)	Persentase Rumah Tangga (%)
1	2
≤ 19	4,35
20-49	35,20
50-99	44,97
100-149	10,37
150+	4,93
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Buleleng, Susenas 2018

Tabel 3.16. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal Per Kapita Kabupaten Buleleng, 2018

Luas Lantai Tempat Tinggal Per Kapita (m ²)	Persentase Rumah Tangga (%)
1	2
≤ 7,2	7,66
7,3-9,9	9,26
≥ 10	83,08
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Buleleng, Susenas 2018

Tabel 3.17. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bangunan Utama Dinding Kabupaten Buleleng, 2018

Bahan Utama Dinding	Persentase Rumah Tangga (%)
<i>1</i>	<i>2</i>
Tembok	93,87
Plesteran Anyaman Bambu/Kawat	0,59
Kayu / Papan	3,47
Anyaman Bambu	1,49
Bambu	0,47
Lainnya	0,11
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali

Tabel 3.18. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bangunan Utama Lantai Kabupaten Buleleng, 2018

Bahan Lantai Rumah	Persentase Rumah Tangga (%)
<i>1</i>	<i>2</i>
Marmer/Granit	0,93
Keramik	54,04
Parket/Vinil/Permadani	0,18
Ubin/Tegel/Teraso	2,80
Kayu/Papan Kualitas Tinggi	0,36
Semen/Bata Merah	36,75
Bambu/Kayu/Papan Kualitas Rendah	0,00
Tanah	4,93
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali

Tabel 3.19. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar Kabupaten Buleleng, 2018

Status fasilitas Buang Air Besar	Persentase Rumah Tangga (%)
<i>1</i>	<i>2</i>
Sendiri	62,84
Lainnya	37,16
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Buleleng, Susenas 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Tabel 3.20. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Buang Air Besar Kabupaten Buleleng, 2018

Jenis Kloset Yang Digunakan	Persentase Rumah Tangga (%)
<i>1</i>	<i>2</i>
Leher Angsa	97,94
Lainnya	2,06
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Buleleng, Susenas 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Tabel 3.21. Persentase Rumah Tangga Menurut tempat Pembuangan Akhir Tinja Kabupaten Buleleng, 2018

Tempat Pembuangan Akhir	Persentase Rumah Tangga (%)
<i>1</i>	<i>2</i>
Tangki Septik/IPAL/SPAL	97,58
Lainnya	2,42
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buleleng, Susenas 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Tabel 3.22. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum Kabupaten Buleleng, 2018

Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum	Persentase Rumah Tangga (%)
<i>1</i>	<i>2</i>
Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	11,71
Leding Metran/ Eceran	45,03
Sumur Bor/ Pompa	7,20
Sumur Terlindung/ Mata Air Terlindung	26,42
Sumur Tidak Terlindung/ Mata Air Tidak Terlindungi	6,77
Lainnya	2,85
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buleleng, Susenas 2018

Tabel 3.23. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Memasak dan MCK Kabupaten Buleleng, 2018

Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum	Persentase Rumah Tangga (%)
1	2
Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	10,92
Leding Metran/ Eceran	45,55
Sumur Bor/ Pompa	4,87
Sumur Terlindung	5,29
Sumur Tidak Terlindung	1,22
Mata Air Terlindung	25,36
Mata Air Tidak Terlindungi	4,14
Air Permukaan, Air Hujan, Lainnya	2,65
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali

Tabel 3.24. Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama Yang Digunakan Untuk Memasak Kabupaten Buleleng, 2018

Bahan Bakar Utama Untuk Memasak	Persentase Rumah Tangga (%)
<i>1</i>	<i>2</i>
Listrik	1,21
Elpiji 5,5kg/Blue Gas/Elpiji 12 kg/3kg	66,98
Gas Kota/Bio Gas	0,00
Minyak tanah	0,25
Briket/Arang	0,00
Kayu Bakar	30,64
Lainnya	0,00
Tidak Memasak	0,92
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali

F. KEMISKINAN

Masalah kemiskinan menjadi masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian bagi pemerintah di negara manapun. Begitupula di Indonesia, kemiskinan menjadi prioritas pembangunan untuk ditangani. Sejak awal kemerdekaan, penanggulangan kemiskinan sudah sering dilakukan dengan berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan menurut asal penyebabnya terdiri dari 2 macam yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah setempat. Sedangkan kemiskinan struktural terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang maupun sekelompok masyarakat tertentu terhadap system atau tatanan sosial yang tidak adil.

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Perbedaan keduanya dilihat berdasarkan pada standar penilaiannya. Standar penilaian ke miskinian relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal. Kemiskinan absolut merupakan standar hidup minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan. Standar keidupan minimum untuk

memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Agar paket kebijakan dan terobosan terkait kemiskinan tepat sasaran, diperlukan pemahaman tentang karakteristik penduduk miskin. Pengentasan kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensi menjadi prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan

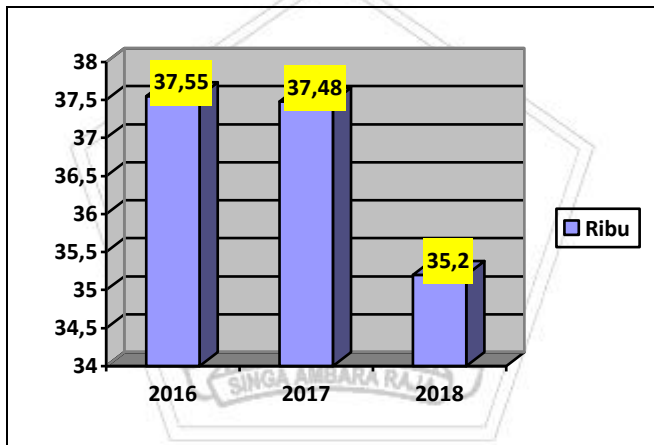
Perkembangan penduduk miskin

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Jika di tahun 2016 jumlah penduduk miskin sekitar 37,55 ribu orang, kemudian menurun sekitar 700 orang di tahun 2017 menjadi sekitar 37,48 ribu orang. Dan di tahun 2018, jumlah penduduk miskin menjadi 35,20 ribu orang.

Kondisi penurunan jumlah penduduk miskin juga diikuti pula dengan penurunan persentase penduduk miskin

(P0). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 sebesar 5,79 persen. Menurun 0,05 poin di tahun 2017 menjadi 5,74 persen. Sedangkan di tahun 2018 persentase penduduk miskin menjadi 5,36 persen (menurun 0,08 poin).

Gambar 3.5. Persentase penduduk miskin di kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018

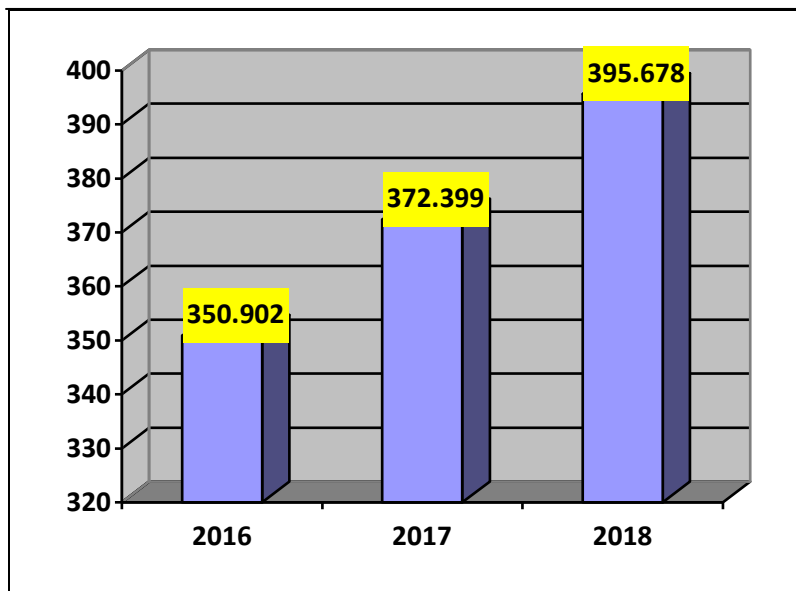


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) - Kab. Buleleng

Pembahasan kemiskinan tidak dapat mengabaikan Garis Kemiskinan (GK) yang digunakan BPS sebagai ukuran dalam menentukan seseorang tergolong sebagai penduduk miskin atau bukan. Garis kemiskinan senantiasa mengalami kenaikan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis Kemiskinan Kabupaten Buleleng di tahun 2018 tercatat Rp. 395.678. Di

tahun 2017 GK Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 372.399. Sedangkan pada tahun 2016 GK Kabupaten Buleleng sebesar Rp.350.902.

Gambar 3.6.Garis Kemiskinan di kabupaten buleleng Tahun 2016-2018



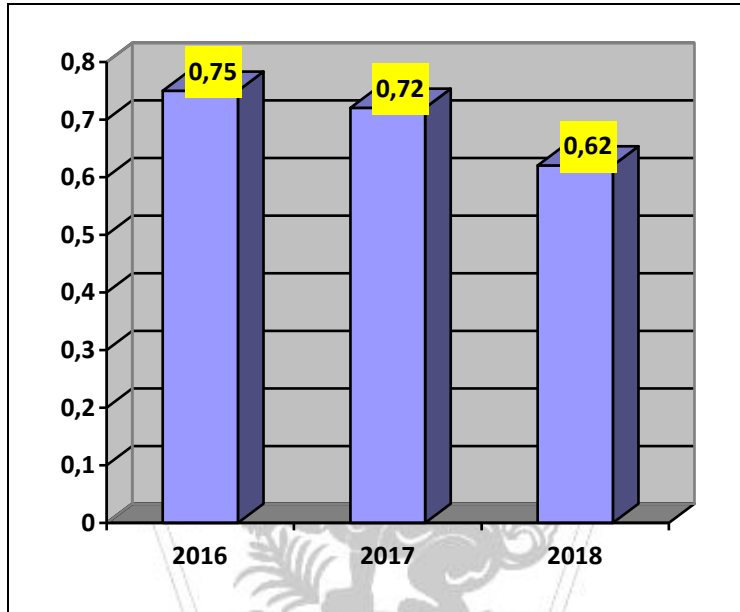
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buleleng

Persoalan kemiskinan bukan hanya seputar jumlah maupun persentase penduduk miskin saja. Terdapat dimensi yang sering kali terabaikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dimensi yang tak kalah pentingnya adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2 Sumber : BPS). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai P1 maupun P2 Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Nilai P1 di tahun 2018 sebesar 0,62 turun 0,10 poin dibandingkan nilai P1 pada tahun 2017 yang tercatat sebesar 0,72. Sedangkan nilai P2 pada tahun 2018 sebesar 0,13 turun sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 0,14.

Gambar 3.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buleleng

Karakteristik penduduk miskin

Pembahasan masalah kemiskinan pastinya akan lebih menarik jika dikaitkan dengan karakteristik penduduk maupun rumah tangga miskin. Karakteristik yang dimaksud adalah pendidikan, ketebagakerjaan, dan perumahan. Dengan mengetahui bagaimana karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin, diharapkan dapat dihasilkan suatu kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Karakteristik pendidikan

Pendidikan merupakan suatu sarana yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Dengan pendidikan yang tinggi, tentunya seseorang akan menjadi lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi pula. Untuk menggambarkan potret kemiskinan dapat menggunakan indikator pendidikan seperti kemampuan membaca dan menulis, partisipasi sekolah, serta jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Indikator pendidikan pertama yang akan diulas adalah kemampuan membaca dan menulis. Angka Melek Huruf penduduk miskin pada kelompok umur 15 hingga 24 tahun adalah sebesar 100 persen. Sedangkan Angka Melek Huruf penduduk miskin pada kelompok umur 15-55 tahun sebesar 95,38. Dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk miskin pada kelompok umur ini 95 orang dapat membaca dan menulis.

Indikator pendidikan berikutnya yang diulas adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk miskin menurut kelompok umur. Program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi fokus pembahasan. Pada kelompok umur 7 hingga 12 tahun, APS penduduk miskin pada 4 tahun terakhir bernilai 100 persen. Artinya

seluruh penduduk miskin pada kelompok umur ini memperoleh akses untuk bersekolah. Sedangkan APS pada kelompok umur 13 hingga 15 tahun mengalami penurunan pada 4 tahun terakhir. Pada tahun 2014, seluruh penduduk miskin kelompok umur 13-15 memiliki akses untuk bersekolah. Namun pada tahun berikutnya menurun menjadi 100 persen. Pada tahun 2018, seluruh penduduk miskin kelompok umur 13-15 memiliki akses untuk bersekolah.

Indikator pendidikan lainnya adalah jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk miskin usia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2018, sebagian besar penduduk miskin tidak tamat SD. 2016 hingga 2018, sebagian besar penduduk miskin tidak tamat Sekolah Dasar, namun persentasenya tidak jauh berbeda dengan penduduk miskin yang menamatkan SD dan SLTP yakni berada pada kisaran 45 persen. Jika diamati dari tahun ke tahun, persentase penduduk miskin yang berpendidikan SLTA keatas semakin berkurang. Sejak tahun 2016, memang sebagian besar penduduk miskin berpendidikan tidak tamat SD hingga lulus SLTP. Namun pada tahun 2017, persentase penduduk yang lulus SD hingga SLTP jauh lebih besar dibandingkan persentase penduduk miskin yang tidak tamat SD.

Karakteristik Ketenagakerjaan

Kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat pendapatan. Pada umumnya, penduduk miskin tidak memiliki pekerjaan ataupun memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang rendah. Salah satu indikator yang mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga adalah lapangan usaha atau sektor pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan utama.

Secara umum, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor informal sekitar 44,93 persen. Yang bekerja di sektor formal sekitar 20,72 persen saja. Sedangkan sisanya sekitar 34,35 persen tidak bekerja. Kondisi bahwa penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dominan bekerja pada sektor informal terjadi pada tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2016, tercatat sekitar 12,89 persen penduduk yang bekerja di sektor formal. Sementara itu, jika dilihat dari sisi sektor pekerjaan penduduk miskin, sebagian besar atau sebesar 55,84 persen penduduk miskin bekerja pada sektor non pertanian. Pada tahun 2018 terjadi lonjakan cukup drastis pada persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor non pertanian ini. Hal sebaliknya terjadi pada sektor pertanian, dimana persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian menurun dari 24,94 persen pada tahun 2017 menjadi 9,81 persen pada tahun 2018.

G. Sosial Lainnya

Era globalisasi membawa perubahan pada kehidupan masyarakat. Perkembangan jaman telah membuat masyarakat harus beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, baik perubahan ke arah positif maupun negatif. Tingkat kebutuhan yang sebelumnya bersifat sekunder maupun tersier telah bergeser menjadi kebutuhan primer.

Pada masa kini, kegiatan liburan atau wisata, eksistensi di tengah masyarakat maupun kebutuhan untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi menjadi contoh kebutuhan yang mengalami pergeseran. Pertukaran informasi yang berlangsung begitu cepat menjadi salah satu kebutuhan utama yang tak terhindarkan untuk menunjang keberlangsungan hidup. Teknologi yang semakin canggih membuat akses dunia tanpa batas. Pada bagian kali ini, akan dibahas beberapa aspek sosial lain yang juga dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat seperti perjalanan wisata, akses pada teknologi informasi dan komunikasi, serta menerima kredit usaha.

Tabel 3.25.Indikator Sosial Lainnya Kabupaten Buleleng, 2018

No.	Indikator	2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan	0,84
2	Persentase rumah tangga penerima kredit usaha	53,77
3	Persentase rumah tangga yang membeli/mendapatkan beras raskin	24,85

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buleleng

Penerima Kredit Usaha

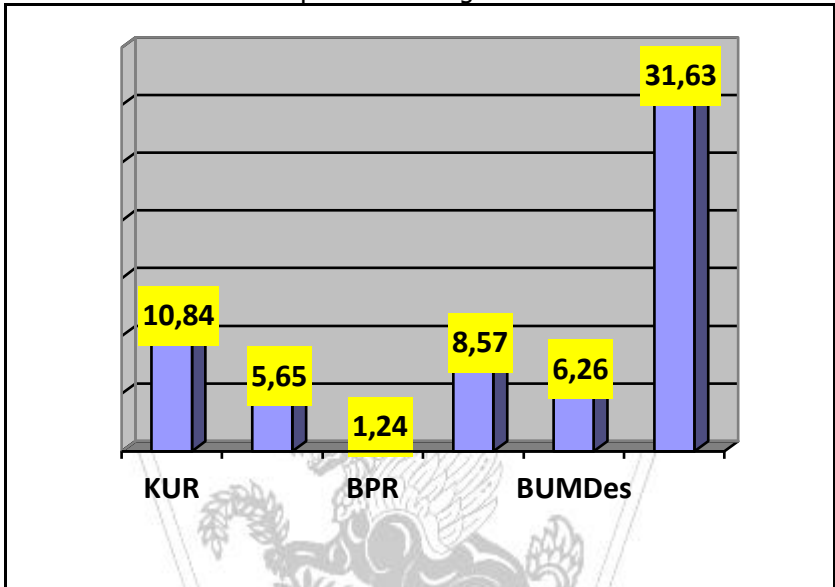
Kredit usaha bila dilihat berdasarkan penggunaan dana pinjaman dapat berupa Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi. Kredit Modal kerja digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasional bisnis, sedangkan Kredit Investasi diarahkan pada pengadaan barang modal jangka panjang dalam ekspansi tersebut. Penerima kredit usaha

pada umumnya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai modal dan pembiayaan bagi usaha produktif, dan umumnya diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), modal ventura, Program Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), pegadaian, dan sebagainya. Dalam Susenas, kredit usaha bisa berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), program bank selain KUR, KUBE/KUB, program koperasi, perorangan (dengan bunga), dan lainnya.

Rumah tangga yang menerima kredit usaha di Kabupaten Buleleng selama tahun 2018 lebih dari 40,68 persen. Penerima kredit usaha yang berasal dari KUR sekitar 15,54 persen, sedangkan dari koperasi sekitar 22,80 persen saja.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Gambar 3.8. Persentase penduduk rumah tangga menerima kredit usaha di kabupaten Buleleng Tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buleleng

Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

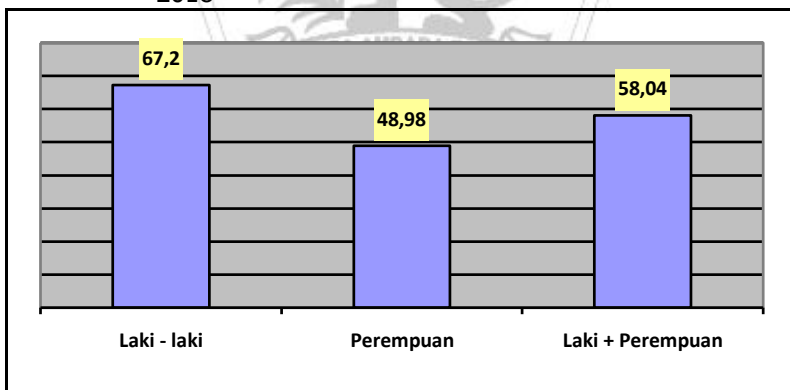
Kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi salah satu pendorong globalisasi dan pesatnya pertumbuhan ekonomi. Kemajuan suatu bangsa di era informasi ini sangat tergantung pada kesediaan infrastruktur dan akses TIK untuk mendorong pergerakan sektor ekonomi. Infrastruktur membantu konektivitas antar wilayah satu dengan wilayah lain secara cepat dan luas.

Kemajuan di bidang teknologi informasi memberikan dampak positif bagi masyarakat. Apabila dikembangkan secara optimal, potensi TIK dapat meningkatkan kualitas

hidup masyarakat. Dalam pembangunan nasional, TIK berperan serta menciptakan lapangan pekerjaan, memberdayakan serta mengembangkan kemampuan masyarakat.

Persentase penduduk Kabupaten Buleleng yang berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler (HP) dalam 3 bulan terakhir sekitar 58,04 persen. Hampir 67 persen penduduk laki-laki berumur 5 tahun ke atas (lebih banyak dari penduduk perempuan yaitu hanya hampir 48 persen) yang memiliki/menguasai HP.

Gambar 3.9. Persentase penduduk Kabupaten Buleleng yang berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler (HP) dalam 3 bulan terakhir Tahun 2018

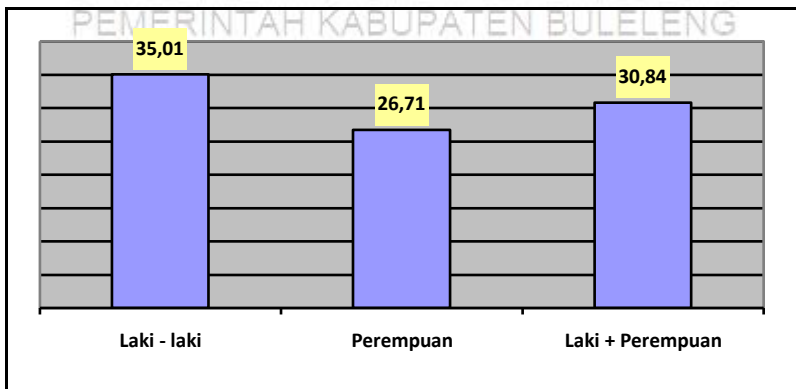


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buleleng

Komputer sebagai salah satu hasil teknologi informasi komunikasi yang sering digunakan oleh masyarakat. Komputer banyak digunakan untuk menunjang

pekerjaan maupun tujuan lainnya. Sekitar 16,85 persen penduduk usia 5 tahun ke atas di Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 menggunakan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya. Banyak fasilitas yang dapat didapatkan dari internet. Mulai dari informasi berupa berita, email, jejaring sosial, hiburan dan lain sebagainya. Persentase penduduk Kabupaten Buleleng yang berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir sekitar 30,84 persen. komputer. Sekitar 35,01 persen penduduk laki-laki dan 26,71 persen penduduk perempuan pada usia tersebut menggunakan komputer.

Gambar 3.10. Persentase penduduk Kabupaten Buleleng yang berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buleleng

Internet merupakan kependekan dari interconnection networking yang merupakan jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya. Banyak fasilitas yang dapat didapatkan dari internet. Mulai dari informasi berupa berita, email, jejaring sosial, hiburan dan lain sebagainya. Persentase penduduk Kabupaten Buleleng yang berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir sekitar 26,71 persen.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK



PENUTUP

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

PENUTUP

1. Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2018 berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng adalah 657.200 jiwa, dengan komposisi 327.300 jiwa penduduk laki-laki dan 329.900 jiwa penduduk perempuan. Nilai *sex ratio* sebesar 99,21 persen. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Buleleng lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki.
2. Diantara penduduk Kabupaten Buleleng yang mengalami sakit menurut hari sakit sebesar 63,90 persen kurang/sampai 3 hari sakit sisanya 36,10 persen lebih dari 3 hari sakit, serta sebagian besar dari mereka yang tidak berobat jalan memilih untuk mengobati sendiri (63,61 persen) dan beberapa beralasan karena merasa tidak perlu berobat (32,67 persen). Namun yang perlu dicermati, terdapat 3,72 persen dari penduduk yang tidak berobat jalan memberikan alasan karena tidak mempunyai biaya serta 0,67 persen menyatakan karena tidak ada sarana/ biayatransport ke fasilitas kesehatan dan biaya berobat
3. Pada tingkat makro, capaian tingkat pendidikan di suatu daerah dapat ditinjau melalui kemampuan baca tulis

penduduknya, atau yang biasa dikenal dengan indikator Angka Melek Huruf. Pada cakupan penduduk usia muda, indikator ini dirasa masih cukup efektif untuk menggambarkan secara umum tingkat pendidikan masyarakat. Pada kelompok penduduk umur 7 sampai 18 tahun, hampir seluruh penduduk Kabupaten Buleleng (98,50 persen) telah memiliki kemampuan baca dan tulis. Hanya terdapat 1,50 persen saja yang buta huruf, termasuk salah satunya mereka yang belum bisa membaca dan menulis karena cacat.

4. Angka Partisipasi Sekolah untuk kelompok umur 7-12 tahun di Kabupaten Buleleng tahun 2018 sudah mencapai 100 persen, artinya dari seratus anak usia 7 – 12 tahun yang ada di Kabupaten Buleleng semua anak yang bisa aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. APS umur 13-15 tahun di Kabupaten Buleleng sebesar 94,39 persen. APS pada kelompok umur 16-18 tahun yakni hanya 80,43 persen.
5. Data Tahun 2018 menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Kabupaten Buleleng menghabiskan 47,25 persen pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan non makanan rumah tangga, dan 52,75 persen sisanya untuk memenuhi kebutuhan makanan. Berdasarkan hasil estimasi, rata-rata pengeluaran penduduk per

kapita di Kabupaten Buleleng tahun 2018 mencapai 950.532,00 rupiah. Artinya, secara rata-rata, setiap penduduk Kabupaten Buleleng menghabiskan paling tidak sebanyak 950.532,00 rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan makanan maupun non makanan

6. Sebagian besar penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 menempati rumah dengan menggunakan atap seng (49,53 persen), genteng (44,59 persen) sisanya menggunakan asbes, beton dan atap lainnya. Apabila ditinjau dari luas lantai perkapita yang digunakan oleh masing-masing anggota rumah tangga, mayoritas penduduk Buleleng (79,35 persen) menguasai lebih dari luas 10 m² dari luas lantai rumahnya.
7. Garis Kemiskinan Kabupaten Buleleng di tahun 2018 tercatat Rp. 395.678 menurun sebesar 0,08 persen dari tahun 2017 dengan persentase penduduk miskin 5,36 persen.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Jl. Singaraja-Sewit Km. 6 Desa Sukadimungga

Telp/Fax. (0362) 41924

Website : www.statistik.bulelengkab.go.id, Email : statistik@bulelengkab.go.id